

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAGI TENAGA KERJA ASING DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

Shella Rizky Dwi Astuti

(1187046)

Indonesia adalah negara yang mempunyai posisi strategis dengan luas wilayah dan kekayaan sumber daya yang dimiliki, termasuk juga dalam bidang ekonomi, pertukaran budaya, tenaga kerja dan lain-lain. Sehingga dapat dipastikan Indonesia berpeluang untuk menjadi magnet dalam kegiatan ekonomi dan lalu lintas perdagangan termasuk tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi MEA Indonesia membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Bahasa sebagai alat komunikasi antara sesama manusia. Era MEA yang menandakan masuknya TKA ke Indonesia. Penggunaan bahasa menjadi suatu permasalahan tersendiri, terutama bila dihadapkan dengan daya saing terhadap tenaga kerja domestik. Asas *National Treatment* mengharuskan setiap TKA harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Penggunaan Bahasa Asing oleh TKA menggeser kedudukan dari Tenaga Kerja Domestik termasuk masalah perlindungan hukumnya.

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif* yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan yaitu data sekunder yang dimaksudkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan tersier. Dalam hal ini melihat UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2013 sebagai bahan hukum primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia dinyatakan bahasa resmi negara dan berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sebagai alat komunikasi. Termasuk dalam hal ini penggunaan Bahasa Indonesia untuk Tenaga Kerja Domestik dan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia. Hal ini untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum termasuk penerapan Asas *National Treatment* di Indonesia.

Kata Kunci: *Tenaga kerja Domestik, Tenaga Kerja Asing, MEA, Bahasa Indonesia, Perlindungan Hukum, Asas National Treatment.*

ABSTRACT

**LEGAL CERTAINTY OF THE USE OF INDONESIAN LANGUAGE BY
FOREIGN WORKERS AND LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN
WORKERS RELATED TO THE LEGISLATION OF INDONESIA**

Shella Rizky Dwi Astuti

(1187046)

Indonesia is a country that has a strategic position along with the area and wealth of resources such as the fields of economy, cultural exchange, labor, and so on. Thus, Indonesia can certainly have a chance to become a magnet in terms of economic activities and trade traffic including foreign workers entering Indonesia. To deal with MEA (ASEAN Economic Community), Indonesia needs qualified human resources. Language is as a means of communication between fellow human beings. The era of MEA indicates the entry of TKA (Foreign Workers) to Indonesia. The use of language becomes a particular problem, especially when it is faced with the competitiveness of domestic workers. The National Treatment Principle requires that every foreign worker use the Indonesian language as a communication means. Foreign Language Usage by Foreign Workers shifts the position of Domestic Workers including their legal protection.

The writing method used in this thesis is by using the approach method of juridical-normative that is a method in normative legal research by using the main source of secondary data or library literature. The used sources of data are secondary data intended to include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this case, we can see Law Number 13 of 2003 on Manpower; and Minister of Manpower Regulation Number 12 of 2013 as the primary legal materials.

The results of this study show that Indonesian language is stated as the official language of the country and serves as the national identity, national pride, the means of unifying the various ethnic groups, and a means of communication. It includes the use of Indonesian Language for Domestic Workers and Foreign Workers who work in Indonesia. It is to assure legal protection and legal certainty including the implementation of the National Treatment Principle in Indonesia.

Keywords: *Domestic Workers, Foreign Workers, MEA, Indonesian Language, Legal Protection, National Treatment Principle.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>Abstract</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Hubungan Pekerja dan Pengusaha	
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	27
2. Perjanjian Antara Pekerja dan Pengusaha	28
3. Perjanjian Kerja	29
4. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja	32
5. Perlindungan Hukum	34
6. Kewajiban Tenaga Kerja	37
7. Kewajiban Pengusaha	38
B. Pengaturan Tenaga Kerja Asing Yang Ada Di Indonesia	40
1. Pengertian Tenaga Kerja Asing	40

BAB III PENGGUNAAN BAHASA DALAM IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI INDONESIA

A. Bahasa Indonesia Sebagai Alat Komunikasi	46
B. Dasar Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia	48

C. Masyarakat Ekonomi Asean	54
1. Sejarah Masyarakat Ekonomi Asean	54
D. Dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN	57
E. Perjanjian-Perjanjian Yang Telah Diratifikasi	57
F. Penerapan Prinsip <i>Most Favoured Nation</i> di Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN	62
1. Pengertian Prinsip <i>Most Favoured Nation</i>	62
2. Pengaturan Prinsip <i>Most Favoured Nation</i>	64
BAB IV ANALITIS KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAGI TENAGA KERJA ASING DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Kepastian Hukum Pengaturan Penggunaan Bahasa Oleh Tenaga Kerja Asing dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia	68
1. Kepastian Hukum Dalam Penggunaan Bahasa	70
B. Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Domestik Di Indonesia Dengan Tidak Diwajibkannya Penggunaan Bahasa Indonesia Oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) Dikaitkan dengan Prinsip <i>Most Favoured Nation</i>	76
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	